

PROBLEMATIKA MADRASAH DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN ISLAM

Khoirul Huda

*MAN 3 Rejotangan Tulungagung
Email: mankhoirulhuda@yahoo.com*

Abstract

Madrasah is a public educational institution distinctively Islamic. Since the issuance of the decree of the Minister and Law No. 3 2/1989 on National Education System, the school is entrusted to manage the education and follow the success of the 9-year compulsory education program. Although the school has held the same position with the public schools, but school achievement is still low. The focus of this paper is an internal problem which includes students, teachers, curriculum, resources and infrastructure, and aims to determine the efforts undertaken at MAN Rejotangan to overcome the problems faced in order to improve the quality of Islamic education. Research on this paper include descriptive study, based on a qualitative research approach, and review of field belongs to science education research, and if viewed from the place designated as a research field. These results indicate the existence of problems serious enough in MAN Rejotangan, which include educators, either quantitatively or qualitatively, the lack of government budget, input a low level, the source of funds and infrastructure is relatively inadequate, student interest low and parents are less concerned about the education, and the development of resources and infrastructures affordably.

Kata Kunci : *Problematika Madrasah, Pendidikan Islam, Mutu.*

PENDAHULUAN

Madrasah memiliki keterkaitan erat dengan pendidikan Islam dan pesantren. Pertumbuhan dan perkembangan pendidikan seiring sejalan dengan perkembangan agama Islam. Sejak awal wahyu turun, proses pendidikan telah berjalan dalam konteks, bentuk, dan makna yang luas.

Wahyu pertama (Al-Alaq: 1-5) merupakan landasan fundamental dalam praktik pendidikan Islam. Ayat 1-5 tersebut menanamkan pentingnya membaca dan menulis yang disertai dengan pengakuan terhadap adanya Dzat Yang Mulia, yaitu Allah Swt. Perspektif ini menjadikan pendidikan Islam memiliki keterkaitan yang erat dengan nilai-nilai Al-Qur'an. Menurut Tibawi, aktivitas tersebut merupakan sebuah dobrakan tersendiri. Tradisi penyebaran ilmu pengetahuan masyarakat Arab waktu itu berlangsung dari mulut ke mulut.¹ Ayat 1-5 Al-Alaq membangun tradisi baru penyebaran ilmu pengetahuan, yaitu melalui membaca dan menulis.

Pendidikan Islam yang terus berkembang menjadikan peradaban Islam juga semakin maju. Tempat pendidikan mengalami perluasan. Masjid yang pada dasarnya berfungsi sebagai tempat ibadah, juga dijadikan sebagai *kuttab*² dan *alaqah*.³ Perkembangan pendidikan semacam ini terjadi pada dua abad pertama sejarah peradaban Islam. Tradisi ini terus tumbuh dan berkembang, khususnya pada masa keemasan peradaban Islam. Lembaga-lembaga pendidikan Islam yang bervariasi didirikan, mulai dari Masjid Khan, dari Al-Qur'an, dari Al-Hikmah, dari Al-Hadits, Zawiayah, Hanqah, Bimanistan sampai dengan madrasah.⁴

Jejak awal istilah madrasah belum diketahui secara pasti. Terdapat

¹ Nurul Huda, "Madrasah: Sebuah Perjalanan Untuk Eksis," dalam Ismail SM (ed.), *Dinamika Pesantren dan Madrasah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 210.

² *Kuttab* adalah lembaga pengajaran baca tulis untuk anak-anak, terutama membaca Al-Qur'an. Imam Tolkhah, *Sejarah Perkembangan Madrasah*, (Jakarta: Depag RI., 1999), 13.

³ *Halqah* adalah lembaga bentuk pertama yang dalam sejarahnya mengembangkan keilmuan di dalam Islam. Nurul Huda, "Madrasah", 170.

⁴ Husni Rahim, *Arah Baru Pendidikan Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), 5.

berbagai perbedaan pendapat tentang persoalan ini. Sebagian ahli sejarah menyebutkan bahwa munculnya istilah madrasah untuk pertama kali terjadi di wilayah kekuasaan Dinasti Samaniyah (204-395 H) di Naisapur.⁵ Meskipun belum menjadi kesepakatan umum, pendapat ini setidaknya menjadi salah satu petunjuk yang penting dipertimbangkan di dalam melacak jejak awal madrasah.

Seiring persebaran Islam yang semakin meluas ke berbagai penjuru dunia, pendidikan Islam juga terus mengalami perkembangan. Pendidikan Islam di Indonesia berkembang sejalan dengan proses penyebaran Islam. Pada awalnya masih bersifat individual. Seiring perkembangan waktu, cara lain yang bersifat institusional dilakukan, yaitu dengan memanfaatkan lembaga-lembaga masjid, surau, dan langgar mulailah secara bertahap berlangsung pengajaran umum mengenai baca tulis Al-Qur'an dan wawasan keagamaan. Namun perkembangan khusus untuk pelaksanaan pendidikan umat Islam di Indonesia baru terjadi dengan pendirian pesantren. Lembaga ini diperkirakan muncul pada abad ke-13 M dan mencapai perkembangannya yang optimal pada abad ke-18 M.⁶ Para ahli sepakat bahwa pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Pesantren inilah yang merupakan cikal bakal munculnya madrasah.

Semangat mendalami ajaran agama secara menyeluruh di kalangan umat Islam terus meningkat dari waktu ke waktu. Hal ini ditandai, antara lain, dari meningkatnya lulusan pesantren yang melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi ke beberapa pusat kajian Islam di Timur Tengah. Lulusan pendidikan Timur Tengah pada masa awal Islam di Indonesia menjadi pemrakarsa pendidikan madrasah. Bersamaan dengan fenomena tersebut, pendidikan Islam di Indonesia juga berinteraksi dengan sistem pendidikan sekolah yang diperkenalkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Titik tekan pendidikan Belanda adalah peningkatan kecerdasan dan keterampilan kerja. Beberapa tokoh organisasi kemasyarakatan Islam mengadopsi

⁵ Imam Tholkah, *Sejarah*, ...22.

⁶ Husni Rahim, *Arab Baru*, ...6.

sistem pendidikan sekolah yang dikenal sekular, namun sekolah dijadikan sebagai instrumen untuk pengajaran agama. Model semacam inilah yang akhirnya menjadi cikal bakal perkembangan madrasah yang terus berkembang sampai sekarang.

Perkembangan madrasah sejak zaman penjajahan hingga kemerdekaan mengalami pasang surut, seiring dengan kebijakan pemerintah maupun pengalaman intern umat Islam sendiri. Kebijakan pemerintah Hindia Belanda terhadap pendidikan Islam pada dasarnya bersifat menekan dan membatasi. Ada kekhawatiran Belanda terhadap munculnya militansi kaum muslimin terpelajar. Salah satu bentuk kebijakan pemerintah Hindia Belanda dalam mengawasi pendidikan Islam adalah dengan terbitnya ordonansi guru pada tahun 1905 dan pada tahun 1926.⁷

Setelah Indonesia merdeka, perhatian pemerintah terhadap pendidikan Islam secara umum meningkat. Indikasinya adalah maklumat BPKNIP tertanggal 22 Desember 1945 yang intinya memajukan pendidikan dan pengajaran di langgar, surau, masjid dan madrasah berjalan terus dan ditingkatkan.⁸ Perhatian pemerintah terhadap madrasah dan pesantren semakin kuat setelah didirikannya Kementerian Agama. Lembaga ini dapat dikatakan sebagai representasi umat Islam dalam memperjuangkan penyelenggaraan pendidikan Islam secara lebih luas.

Masa Orde Lama ditandai dengan perkembangan madrasah yang cukup menonjol. Pada masa ini berdiri PGA, PHIN, MWB 8 Tahun, dan juga mulai adanya penegerian madrasah swasta pada semua tingkatan. Pada masa-masa awal Orde Baru, kebijakan mengenai madrasah bersifat melanjutkan dan memperkuat kebijakan Orde Lama. Perkembangan yang cukup signifikan dalam rangka pembinaan mutu pendidikan madrasah adalah dikeluarkannya kebijakan pemerintah berupa SKB tiga menteri tanggal Maret 1975. Isi SKB tersebut adalah Madrasah Ibtida'iyah (MI)

⁷ Mastuki, *Menelusuri Pertumbuhan Madrasah di Indonesia*, (Jakarta: Depag RI., 2001), 12.

⁸ *Ibid.*, 15.

setingkat dengan Sekolah Dasar (SD), Madrasah Tsanawiyah (MTs) setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan Madrasah Aliyah (MA) setingkat dengan Sekolah Menengah Atas (SMA).⁹

Integrasi madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional semakin nyata pada akhir dekade 1980-an. Saat itu pemerintah mengesahkan Undang-undang Nomor 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Secara operasional UU ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 dan SK Mendikbud Nomor 048/U/1992 dan Nomor 054/U/1993 yang antara lain menetapkan bahwa MI/MTs wajib memberilkan bahan kajian sekurang-kurangnya sama dengan SD/SLTP. SK ini ditindaklanjuti dengan SK Menteri Agama Nomor 638 dan 369 Tahun 1993 tentang penyelenggaraan MI dan MTs. Sementara tentang Madrasah Aliyah diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, SK Mendikbud Nomor 0489/U/1992 dan SK Menteri Agama Nomor 370 Tahun 1993. Pengakuan ini mengakibatkan tidak ada perbedaan lagi antara MI/MTs/MA dengan SD/SLTP/SMA, dengan ciri khas agama Islamnya.¹⁰

Madrasah berdiri atas inisiatif dan realisasi dari pembaruan sistem pendidikan Islam yang telah ada. Pembaruan tersebut, menurut Karl Stembrink, sebagaimana dikutip Rahardjo, meliputi tiga hal, yaitu: usaha penyempurnaan terhadap sistem pendidikan pesantren, penyesuaian dengan sistem pendidikan Barat, dan upaya menjembatani antara sistem pendidikan tradisional pesantren dan sistem pendidikan Barat.¹¹

Dalam sistem pendidikan nasional, madrasah disebut sebagai sekolah yang berciri khas Islam. Sampai sekarang ini madrasah masih terus mencari bentuk idealnya. Identifikasi madrasah bermuara pada dua hal, yaitu problem *interplay* (tarik ulur) kebijakan madrasah dalam integrasi sistem pendidikan nasional dan rendahnya tingkat apresiasi masyarakat

⁹ *Ibid.*, 26.

¹⁰ *Ibid.*, 30.

¹¹ Raharjo, "Madrasah Sebagai The Centre of Excellence," dalam Ismail SM (ed.), *Dinamika Pesantren*, 26.

dalam upaya pengembangan madrasah.¹² Meskipun demikian, madrasah masih harus berusaha keras menghadapi berbagai persoalan yang ada. Beberapa masalah yang harus dihadapi adalah: pertama, madrasah telah kehilangan akar sejarahnya. Keberadaan madrasah bukan merupakan kelanjutan pesantren. Dan kedua, terdapat dualisme pemaknaan terhadap madrasah. Di satu sisi, madrasah didentikkan dengan sekolah, karena memiliki muatan kurikulum yang relatif sama dengan sekolah umum. Di sisi lain, madrasah dianggap sebagai pesantren dengan sistem klasikal yang kemudian dikenal dengan Madrasah Diniyah.¹³

Berdasarkan paparan di atas maka tulisan ini akan mengkaji dua hal. *Pertama*, problem-problem yang dihadapi Madrasah Aliyah Negeri Rejotangan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan Islam. *Kedua*, usaha-usaha yang dilakukan Madrasah Aliyah Negeri Rejotangan untuk mengatasi problema yang dihadapi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan Islam.

Madrasah Sebagai Lembaga Pendidikan Islam

Madrasah berasal dari bahasa Arab, dari kata dasar “*darasa*” yang artinya “tempat belajar para pelajar,” dapat juga diartikan “jalan”. Kata “madrasah” juga ditemukan dalam bahasa Hebrew atau Aramy, dari kata “*darasa*” yang berarti “membaca dan belajar” atau “duduk untuk belajar”.¹⁴ Dari kedua bahasa tersebut, kata madrasah mempunyai arti yang serupa, yaitu “tempat belajar”. Dari akar makna tersebut kemudian berkembang menjadi istilah yang berkonotasi sebagai tempat pendidikan yang bernuansa Islam.

Sampai saat ini belum ada kesepakatan tentang sejak kapan madrasah sebagai istilah untuk satu jenis pendidikan Islam. Namun para ahli sejarah telah mencatat madrasah yang muncul pada masa awal pertumbuhan Islam. Di Naisapur, istilah madrasah merujuk pada pendidikan tinggi (*Al-Jamiyah*) yaitu lembaga pendidikan

¹² Luqman Hakim, *Madrasah Tsanawiyah Terbuka*, (Jakarta: Depag, RI., 2004),v.

¹³ Raharjo, “Madrasah”, 27.

¹⁴ Imam Tholikhah, *Sejarah*, ..5.

tinggi setelah pendidikan dasar *kuttab*, pendidikan menengah, masjid, dan lembaga pendidikan berasrama (masjid khan). Madrasah pertama ini dikembangkan pada abad ke 10 M - 4 H, di bawah naungan Dinasti Samaniyah (204-395 H/819-1005 M) di Naisapur.¹⁵

Adapun Madrasah Nidzamiyah didirikan oleh Perdana Menteri Nadzam al-Mulk (1018 M/ 1019–1092 M). Ia merupakan penguasa Bani Saljuk pada abad ke 11 M. Madrasah yang didirikan ini merupakan madrasah pertama yang didirikan di dunia Islam. Bentuk dan sistemnya mendekati madrasah era sekarang,¹⁶ sehingga madrasah dapat dikatakan sebagai pembatas yang membedakan dengan era pendidikan Islam sebelumnya. Era baru itu ialah adanya ketentuan-ketentuan yang lebih jelas, yang berkaitan dengan komponen-komponen pendidikan dan keterlibatan pemerintah dalam pengelolaan madrasah.

Penulis sejarah pendidikan Islam Indonesia umumnya menginformasikan kemunculan dan perkembangan madrasah berkaitan dengan pesantren. Lembaga ini diperkirakan muncul pada abad ke-13 dan mencapai perkembangannya yang optimal pada abad ke-18. Para ahli sepakat jika pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia.¹⁷ Sumber-sumber yang ada menjelaskan bahwa pertumbuhan madrasah di Indonesia dipengaruhi secara cukup kuat oleh tradisi madrasah di Timur Tengah.

Kebijakan yang kurang menguntungkan terhadap pendidikan Islam masih berlanjut pada masa penjajahan Jepang, meskipun terdapat beberapa modifikasi. Untuk memperoleh dukungan umat Islam, pemerintah Jepang mengeluarkan kebijakan yang menawarkan bantuan dana bagi madrasah. Pemerintah Jepang juga membiarkan dibukanya kembali madrasah-madrasah yang ditutup pada masa pemerintah Hindia Belanda. Meskipun demikian Jepang tetap mewaspadai madrasah-madrasah itu memiliki potensi perlawanan yang membahayakan Jepang di Indonesia.

¹⁵ *Ibid.*, 22.

¹⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Ensiklopedi Islam* 3, 106.

¹⁷ Husni Rahim, *Arab Baru...*, 6.

Selanjutnya untuk memobilisasi dukungan umat Islam, pemerintah Jepang mengadakan hubungan yang sangat dekat dengan tokoh-tokoh Islam. Pemerintah Jepang juga mendirikan *shumubu* (Kantor Urusan Agama) yang menggantikan *Kantoor Voor het Irlandsche Zaken* (Kantor Urusan Pribumi) yang didirikan oleh Hindia Belanda. Salah satu bidang tugasnya adalah tentang pendidikan. Shumubu merupakan cikal bakal lahirnya Kementerian Agama setelah kemerdekaan.

Setelah Indonesia merdeka, perhatian terhadap madrasah atau pendidikan Islam umumnya semakin membaik. Pemerintah memberikan perhatian dan bantuan materiil kepada madrasah. Perhatian pemerintah terhadap madrasah dan pesantren semakin terbukti ketika didirikan Kementerian Agama pada tanggal 3 Januari 1946. Yang sebagian satu tugasnya adalah: (1) Memberi pengajaran agama di sekolah negeri dan partikelir; (2) Memberi pengetahuan umum di madrasah; dan (3) Mengadakan Pendidikan Guru Agama (PGA) dan Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN).¹⁸

Hingga menjelang keruntuhan Orde Lama, kebijakan pemerintah menyangkut pendidikan agama cukup baik. Sejumlah ketetapan MPRS, Peraturan Pemerintah, Keputusan Pemerintah dan Surat Keputusan Menteri dikeluarkan. Beberapa keputusan tersebut memberi perhatian yang lebih baik pada pendidikan agama dan lembaga-lembaganya.

Pada masa-masa awal pemerintahan Orde Baru, kebijakan mengenai madrasah bersifat melanjutkan dan memperkuat kebijakan Orde Lama. Pada tahap ini madrasah belum dipandang sebagai bagian dan sistem pendidikan nasional, tetapi merupakan lembaga pendidikan otonom di bawah pengawasan Menteri Agama.

Setelah tumbanganya Orde Baru sampai sekarang, madrasah tidak ada perubahan yang signifikan. Madrasah melakukan usaha pementapan struktur secara lebih integral-komprehensif. Meskipun demikian, bukan

¹⁸ Maksum, *Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 123.

berarti madrasah sudah bebas dari permasalahan. Beberapa informasi menunjukkan bahwa jumlah madrasah swasta jauh lebih besar daripada madrasah negeri. Keadaan ini berbalik dengan sekolah, dimana sekolah negeri jauh lebih besar dari pada sekolah swasta. Walaupun demikian beberapa kajian dan survey menunjukkan terjadinya gejala kebangkitan lembaga-lembaga pendidikan Islam ini. Dalam konteks ini beberapa madrasah menemukan popularitas baru, yakni beberapa madrasah kini dipandang bukan lagi hanya merupakan lembaga transmisi ilmu-ilmu agama Islam, tetapi juga tempat menanamkan apresiasi, penguasaan ketrampilan dan keahlian dalam bidang sains-teknologi, bahkan perkembangan kuantitatif yang menarik adalah gejala pertumbuhan madrasah-madrasah favorit karena keunggulan pendidikannya.

Menurut hemat penulis problematika pendidikan di madrasah secara garis besar dapat dikategorikan menjadi dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Ada dua faktor eksternal yang menjadi problema madrasah dalam mempertahankan dan mengembangkan eksistensinya, yaitu problem politik dan partisipasi masyarakat.

Sejak awal pertumbuhannya, pendidikan madrasah senantiasa mendapatkan permasalahan yang cukup serius. Permasalahan tersebut antara lain muncul dari kebijakan pemerintah yang dipandang bersifat tidak bisa kompromi, bahkan merugikan terhadap keberadaan madrasah itu sendiri.

Memang selama ini telah ada perwakilan masyarakat di madrasah yang diberi nama Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3) sekarang Komite Sekolah. Sayangnya lembaga ini sengaja didesain oleh pemerintah untuk hanya memiliki peran yang minimal, terutama hanya terbatas pada permintaan pendapat tentang kenaikan SPP siswa.¹⁹

Bila ditelusuri, ada empat persoalan yang menjadi kendala utama sehingga BP3 tidak mempunyai peran yang signifikan. *Pertama*, pada banyak madrasah swasta, lembaga BP3 tidak mempunyai wewenang

¹⁹ Ua Abung, *Problematika Madrasah*, (Jakarta: Departemen Agama RI., 2001), 33.

yang cukup untuk melakukan sesuatu, karena yang berkuasa adalah pengurus yayasan yang biasanya dan Ormas sosial. *Kedua*, tidak terdapat komunikasi dan koordinasi yang sinergis antara pengurus BP3 dan pengurus madrasah. Kedua belah pihak belum mencerminkan sebuah tim yang kompak dan pada sebagaimana mestinya. *Ketiga*, keterbatasan sumber daya manusia dan lainnya, kebanyakan pengurus BP3 belum memiliki visi masa depan tentang madrasah, terutama menyangkut peran madrasah dalam menyangkut perkembangan masyarakat, dan tanggung jawab masyarakat dalam meningkatkan mutu madrasah. *Keempat*, belum adanya kesepahaman yang melahirkan kerja sama sinergis antara madrasah dan masyarakat. Masyarakat menganggap bahwa tugas penyelenggaraan pendidikan adalah tugas pengurus madrasah atau pemerintah.²⁰

Secara internal, meskipun belum tuntas, madrasah telah mengalami modernisasi. Implikasinya, madrasah memiliki posisi sejajar dengan sekolah umum lain. Namun demikian, madrasah harus menata infrastruktur dan suprastrukturnya sehingga dapat memberikan layanan pendidikan yang berkualitas kepada masyarakat.

Adapun faktor internal yang menjadi problema madrasah antara lain adalah: *pertama*, Kondisi guru yang belum memadai. Jumlah madrasah swasta jauh lebih besar daripada madrasah negeri. Kondisi seperti ini menimbulkan masalah tersendiri. Khusus mengenai guru, jumlah guru negeri relatif lebih kecil dibanding swasta. Juga masih banyak guru yang *mismatch* dan *under qualified*, terlebih di madrasah swasta.

Kedua, minimnya sarana dan prasarana pendidikan. Kendati madrasah dianggap sama dan sejajar dengan sekolah umum, namun madrasah belum memperoleh anggaran pendidikan secara adil. Sejauh ini, anggaran pengembangan madrasah hanya diperoleh dari anggaran keagamaan.²¹ Minimnya anggaran pemerintah bagi madrasah berdampak pada kelengkapan sarana pendidikan. Fasilitas gedung madrasah, renovasi,

²⁰ *Ibid.*, 35.

²¹ *Ibid.*, 24.

dan pengadaan alat penunjang pendidikan menjadi sangat minim.

Ketiga, kurikulum. Melalui SK-SK Mendikbud, yang ditegaskan dengan SK-SK Menteri Agama, maka MI, MTs, dan MA wajib memberikan bahan sekurang-kurangnya sama dengan SD, SLTP, dan SMU untuk mata pelajaran umum dan menambahkan pelajaran agama. Implikasinya, madrasah sama dengan sekolah umum yang berciri khas Islam. Perubahan seperti ini, di satu sisi memang merupakan perubahan yang menggembirakan. Lulusan madrasah menjadi sederajat dengan lulusan sekolah umum yang setingkat. Namun di sisi lain, justru menjadi problema tersendiri. Problemnya adalah: (a) Berkurangnya muatan materi pendidikan agama dapat dilihat sebagai pendangkalan pemahaman agama. Muatan kurikulum sebelum SKB saja dirasa belum mampu mencetak muslim sejati, apalagi kemudian dikurangi. (b) Tamatan madrasah serba tanggung. Pengetahuan agamanya tidak mendalam sedangkan pengetahuan umumnya juga rendah.²² Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam yang hidup dari, oleh dan untuk masyarakat muslim, belum mampu melahirkan generasi-generasi muda Islam yang mampu menjawab tantangan zaman. Bahkan lebih memprihatinkan lagi tamatan madrasah masih dipandang mempunyai prestasi yang rendah.

Keempat, prestasi siswa madrasah rendah. Rendahnya prestasi madrasah tidak dapat dipungkiri. Hal ini tampak jelas apabila indikator keberhasilan siswa itu dilihat dari Nilai UN yang diperoleh siswa. Juga dapat ditinjau dari jumlah siswa yang diterima di perguruan tinggi umum untuk jurusan umum. Realitas ini juga merupakan problema tersendiri yang harus diselesaikan secara komprehensif sehingga mutu pendidikan di madrasah akan mampu bersaing dengan sekolah-sekolah umum lainnya.

Pendidikan Islam

Ki Hajar Dewantara mendefinisikan pendidikan sebagai daya upaya untuk memajukan budi pekerti (kekuatan batin), pikiran (intelektual) dan jasmani anak-anak, selaras dengan alam dan masyarakatnya. Muhammad

²² *Ibid.*, 228.

Natsir, secara filosofis menyatakan, bahwa yang dinamakan pendidikan ialah suatu pimpinan jasmani dan ruhani menuju kesempurnaan dan kelengkapan arti kemanusiaan dengan arti sesungguhnya.²³

Jika dihubungkan dengan Islam maka pendidikan memiliki pengertian seluruh totalitasnya yang berkonotasi dengan istilah “*tarbiyah*”, “*ta’lim*”, dan “*ta’dib*” yang harus dipahami secara bersama-sama. Ketiga istilah itu mengandung makna yang amat dalam, menyangkut manusia dan masyarakat serta lingkungan yang dalam hubungannya dengan Tuhan saling berkaitan antara satu dengan lainnya.

Azyumardi Azra memberikan pengertian pendidikan Islam sebagai pendidikan manusia seutuhnya, akal dan hatinya, ruhani dan jasmaninya, akhlak dan keterampilannya. Implikasinya, pendidikan Islam menyiapkan manusia untuk hidup, baik dalam keadaan damai maupun perang, dan menyiapkannya untuk menghadapi masyarakat dengan segala kebaikan dan kejahatannya, manis dan pahitnya.²⁴ Adapun tujuan akhir pendidikan Islam adalah terwujudnya ketundukan yang sempurna kepada Allah, baik secara pribadi, komunitas, maupun seluruh umat manusia.²⁵ Hery Noer Aly menyatakan bahwa tujuan pendidikan Islam dapat diklasifikasikan menjadi tiga tujuan pokok, yaitu keagamaan, keduniaan dan ilmu untuk ilmu. Tiga tujuan tersebut terintegrasi dalam satu tujuan yang disebut tujuan tertinggi pendidikan Islam, yaitu tercapainya insan kamil.²⁶

Dari pengertian dan tujuan di atas tampak bahwa penekanan pendidikan Islam adalah pada “bimbingan” yang menyangkut ranah iman, ilmu, amal, akhlak dan sosial. Dengan demikian pendidikan Islam tidak hanya menyangkut hubungan makhluk dengan *Khalik*-nya saja, akan tetapi juga hubungan makhluk dengan makhluk lain. Tidak hanya

²³ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Melenium Baru*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), 4.

²⁴ *Ibid.*, 5

²⁵ Imam Fu’adi, “Konsep Tujuan Dalam Pendidikan Islam,” dalam Akhyak (ed.), *Meniti Jalan Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 448.

²⁶ Hery Noer Aly dan Munzier S, *Watak Pendidikan Islam*, (Jakarta: Friska Agung Insani, 2000), 151.

menyangkut *hablum minallah* akan tetapi juga *hablum minannas*.

Secara garis besar, komponen-komponen yang termuat dalam sistem pendidikan Islam sekarang ini merupakan pengembangan dari sistem pendidikan terdahulu. Ditinjau dari perspektif sejarah, sistem pendidikan Islam yang pertama kali terdiri dari dua komponen, yaitu tujuan dan alat pendidikan. Kemudian mengalami perkembangan sehingga komponen sistem pendidikan Islam itu terdiri atas tujuan, pendidik, anak didik, sarana/alat dan lingkungan.²⁷

Mengenai mutu pendidikan Islam, menurut Abuddin Nata, dapat dilihat melalui berbagai indikator berikut:

1. Secara akademik, lulusan pendidikan tersebut dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
2. Secara moral, lulusan pendidikan tersebut dapat menunjukkan tanggung jawab dan kepeduliannya kepada masyarakat sekitarnya.
3. Secara individual, lulusan pendidikan tersebut semakin meningkat ketaqwaannya.
4. Secara sosial, lulusan pendidikan tersebut dapat berinteraksi dan bersosialisasi dengan masyarakat sekitarnya.
5. Secara kultural, ia mampu menginterpretasikan ajaran agamanya sesuai dengan lingkungan sosialnya.²⁸

Mewujudkan yang efektif dan bermutu tinggi memang tidak semudah membalik telapak tangan. Perlu adanya semangat dan kreativitas yang tinggi. Secara umum eksistensi madrasah masih tergolong rendah, bahkan memprihatinkan. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kegiatan belajar mengajar di madrasah, yaitu dengan pembenahan kurikulum; peningkatan kualifikasi, kompetensi dan profesionalisme tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan; penetapan standar kelengkapan dan kualitas sarana dan prasarana;

²⁷ Armai Arief, *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), 70.

²⁸ Abuddin Nata, *Manajemen Pendidikan Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 172.

pelaksanaan program peningkatan mutu pendidikan berbasis sekolah; dan penciptaan iklim dan suasana kompetitif dan kooperatif antar sekolah.²⁹

Kemudian menurut Bert Creemers seorang ahli pendidikan Belanda bahwa dasar sekolah madrasah yang efektif mencakup empat level, yaitu siswa, kelas, sekolah dan konteks.³⁰

Adapun usaha-usaha nyata yang telah dilakukan pemerintah melalui Departemen Agama dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di madrasah menurut hemat peneliti paling tidak menyangkut beberapa hal, yaitu pendidik/guru, peserta didik, kurikulum, dana dan sarana-prasarana.

Meskipun bukan merupakan satu-satunya tolak ukur keberhasilan pendidikan, namun parameter angka nilai yang tinggi melalui Ujian Akhir Nasional adalah salah satu target yang digunakan untuk mengklasifikasi pendidikan mana yang paling favorit. Artinya suatu lembaga pendidikan dikatakan maju, unggul, favorit dan sebagainya jika siswa-siswinya mendapatkan nilai Ujian Akhir Nasional yang tinggi. Begitu pula sebaliknya. Dalam konteks yang demikian, siswa-siswi madrasah secara umum masih berada di bawah nilai siswa-siswi sekolah umum. Jika terdapat madrasah yang siswa-siswinya mendapatkan nilai angka tinggi itu hanya terjadi pada satu dua madrasah saja. Itu pun juga satu dua anak saja. Sedangkan secara umum masih berada di bawah standar.

Mengenai peningkatan mutu pendidikan, pemerintah melalui Departemen Agama, telah banyak melaksanakan program-programnya. Namun program-program tersebut belum banyak yang secara khusus menyangkut kepada siswa. Memang ada beberapa program pemerintah yang berupa bantuan pemberian beasiswa berupa BSM ataupun sejenisnya. Namun menurut hemat peneliti hal itu penekanannya lebih pada anak yang kurang mampu yang dikhawatirkan tidak dapat melanjutkan dan atau menyelesaikan sekolahnya, bukan pada pemberian motivasi untuk

²⁹ Indra Djati Sidi, *Menuju Masyarakat Belajar, Menggagas Paradigma Pendidikan* (Jakarta: Logos, 2003), 74-75.

³⁰ Jamaludin (ed.), *"Madrasah Yang Efektif," Mendiskusikan Kembali Eksistensi Madrasah*, (Jakarta, Logos, 2003), 65.

meningkatkan prestasi mereka.

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di madrasah, kaitannya dengan sarana-prasarana, atau peningkatan fisik madrasah, Pemerintah melalui Kementerian Agama RI. telah melaksanakan program bantuan yang biasa diistilahkan dengan BOS. Program ini bersifat subsidi bersama oleh pemerintah dan masyarakat, atau yang lebih dikenal dengan istilah imbal swadaya.³¹ Program ini dimaksudkan untuk kegiatan pembangunan dan rehabilitasi fasilitas pendukung sarana pembelajaran serta pengadaan mebel. Termasuk pula program bantuan sarana-prasarana pada madrasah adalah adanya Bantuan Operasional dan Pemeliharaan (BOP), pengadaan buku-buku perpustakaan dan sebagainya. Meski bantuan-bantuan tersebut jumlahnya relatif terbatas akan tetapi paling tidak dapat memberikan rangsangan bagi pengelola pendidikan untuk termotivasi dalam upaya peningkatan mutu pendidikannya.

PAPARAN, TEMUAN, DAN ANALISA HASIL PENELITIAN

Keberadaan peserta didik di Madrasah Aliyah Negeri Rejotangan, baik terkait dengan perkembangan jumlah peserta didik tiga tahun terakhir, asal peserta didik sebelumnya, keadaan orang dan juga nilai UN pada waktu masuk di MAN Rejotangan. Hal ini adalah merupakan masukan dan sekaligus problem yang harus diselesaikan.

Meski hal ini tidak dapat dijadikan alasan kurang berhasil pendidikan di madrasah, namun paling tidak, dapat dijadikan sebagai bahan untuk digunakan agar mampu menghasilkan output yang lebih baik. Sebab bagai-manapun juga tugas utama madrasah adalah bagaimana dapat mencerdaskan siswa-siswinya demi menghadapi berbagai tantangan yang ada dan memberikan harapan bagi kehidupannya.³² Dengan kata lain, madrasah harus mampu mengembangkan potensi siswa-siswinya setara dengan pondok pesantren di satu sisi dan setara dengan sekolah

³¹ Sujoto dan Abd. Wafi, *Profil Madrasah Negeri di Jawa Timur*, (Surabaya: Depag Jawa Timur, 2003), 9.

³² *Ibid.*, 40.

umum di sisi lain.

Memang tidak semudah diucapkan untuk dapat mewujudkan hal tersebut di atas. Problem, kendala, dan tantangan selalu silih berganti bahkan tumpang tindih. Tidak banyak perbedaan dengan madrasah lainnya, problem di Madrasah Aliyah Negeri Rejotangan yang berkaitan dengan siswa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan secara singkat antara lain:

1. Pengalaman atau latar belakang kemampuan agama siswa beragam,
2. Sebagian besar input siswa yang prestasinya rendah sampai menengah,
3. Sebagian besar orang tua siswa kurang peduli terhadap pendidikan,
4. Sebagian besar orang tua siswa berprestasi menengah ke bawah,
5. Minat belajar dan kreativitas siswa masih kurang.³³

Pendidik/Guru

Jumlah guru yang ada di Madrasah Aliyah Negeri Rejotangan ini sebanyak 47 orang, dengan 29 orang Pegawai Negeri dan 18 orang guru swasta (GTT). Dari jumlah di atas, guru-guru di Madrasah Aliyah Negeri Rejotangan pada tahun pelajaran 2015/2016 dapat dikatakan cukup banyak. Walaupun demikian ternyata dari data yang kami peroleh dan juga dikuatkan dengan interview, ternyata masih ada kendala yang dihadapi Madrasah Aliyah Negeri Rejotangan yang berkaitan dengan guru, antara lain:

1. Masih adanya guru yang mengajar tidak sesuai dengan bidang studinya (guru salah kamar),
2. Kurangnya guru dinas,
3. Sebagian guru ada yang kurang tanggap (kurang peduli) terhadap mutu pendidikan,
4. Masih banyak guru yang mengajar dengan metode belum bervariasi.³⁴

Data di atas menunjukkan bahwa problem yang dihadapi Madrasah Aliyah Negeri Rejotangan berkaitan dengan keberadaan guru perlu

³³ Interview Wk Kesiswaan MAN Rejotangan pada bulan Juli 2015.

³⁴ Interview Wk Kurikulum MAN Rejotangan pada bulan Juli 2015

mendapat perhatian yang serius pula. Hal ini tampak jelas bahwa dari 47 guru yang dibutuhkan, hanya 29 guru PNS, yang berarti hanya 61,72 %. Ini menunjukkan guru di Madrasah Aliyah Negeri Rejotangan hanya terpenuhi 61,72 %. Lebih dari itu, dari 29 guru dinas yang ada ternyata 3 orang (10,35%) guru dinas termasuk guru salah kamar.

Kurikulum

Madrasah Aliyah Negeri Rejotangan yang merupakan lembaga pendidikan formal setingkat SMU, tentu kurikulum yang diberlakukan di Madrasah Aliyah Negeri Rejotangan adalah kurikulum yang diberlakukan oleh pemerintah, sesuai dengan ketentuan-ketentuannya.

Di samping hal tersebut di atas, Madrasah Aliyah Negeri Rejotangan dalam rangka untuk meningkatkan mutu pendidikannya juga menambahkan materi muatan lokal yang meliputi Komputer / Prodistik (bekerja sama dengan ITS), Bahasa Arab, dan bahasa Inggris (dalam bentuk percakapan), dan Tahfizd Al-Qur'an.

Perjalanan Madrasah Aliyah Negeri Rejotangan seperti diuraikan di atas, masih pula terdapat beberapa masalah atau problem-problem yang berkaitan dengan kurikulum. Di antara problem-problem itu antara lain:

1. Terlalu banyaknya bidang studi yang harus diajarkan,
2. Kurikulum belum mengacu pada kepentingan anak didik di masyarakat,
3. Masih seringnya terjadi perubahan ataupun penyempurnaan pada Kurikulum 2013.³⁵

Sumber Dana, Sarana dan Prasarana

Memang kendati madrasah dianggap sama dan sejajar dengan sekolah umum, namun madrasah belum memperoleh anggaran pembangunan pendidikan secara adil. Oleh sebab itu kemampuan madrasah untuk membangun fasilitas gedung, renovasi, pengadaan alat penunjang pendidikan menjadi sangat minim. Demikian juga kondisi

³⁵ *Ibid.*

Madrasah Aliyah Negeri Rejotangan, yang tentu saja tidak jauh berbeda dengan kondisi madrasah secara umum.

Dilihat dari sarana prasarana dan sumberdana yang ada di Madrasah Aliyah Negeri Rejotangan ternyata terdapat beberapa problema yang dihadapi, yaitu:

1. Kurangnya alat peraga dan laboratorium,
2. Tidak adanya laboratorium IPS,
3. Tingkat ekonomi orang tua siswa sebagian besar menengah ke bawah, sehingga belum bisa meningkatkan pembiayaan sekolah,
4. Kecilnya sumbangan dari pemerintah.³⁶

Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri Rejotangan

Madrasah Aliyah Negeri Rejotangan merupakan sekolah formal negeri tingkat menengah atas yang berada di lingkungan Departemen Agama. Dengan demikian maka pendidikan dan pengajaran yang dimiliki tentu secara umum mengacu pada aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu dengan sistem klasikal dan jadual yang ketat serta selalu mengikuti kurikulum dan petunjuk yang ada.

Masalah yang senantiasa muncul menjadi polemik masyarakat dari berbagai stratifikasi sosial dalam dunia pendidikan adalah masalah yang berkisar pada rendahnya mutu dan relevansi pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja. Karena itu banyak kritik yang dilontarkan kepada lembaga pendidikan, termasuk juga madrasah. Rendahnya mutu pendidikan madrasah secara umum ditandai dengan ketidakmampuan lulusan pendidikan tersebut untuk berkompetensi dengan para lulusan lembaga pendidikan lain dalam memasuki jenjang pendidikan tinggi umum, baik nasional maupun internasional, atau rendahnya pendidikan madrasah sering kali diukur dari nilai Ujian Nasional (UN) yang masih jauh lebih rendah jika dibanding dengan sekolah lain yang setingkat

Di sisi lain, juga masih rendahnya daya relevansi program

³⁶ Interview WAKA Sarpras MAN Rejotangan pada bulan Juli 2015.

pendidikan di madrasah dengan kebutuhan dunia kerja dan pembangunan, hal ini mengakibatkan para lulusan lembaga tersebut tidak siap dalam memasuki dunia kerja. Dengan demikian membuat para lulusan sering kali menjadi tenaga pengangguran.

Madrasah Aliyah Negeri Rejotangan menyadari keadaan tersebut di atas, sehingga Madrasah Aliyah Negeri Rejotangan mengadakan pengembangan-pengembangan dalam pola pendidikannya. Pola pengembangan ini menurut hasil observasi dan *interview* peneliti dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok, yaitu pengembangan akademik, pengembangan ke-Islaman, pengembangan ketrampilan dan kemasyarakatan, dan pengembangan sumberdana dan sarana prasarana.

Pengembangan Akademik

Yang dimaksud oleh peneliti tentang pengembangan akademik adalah upaya yang dilakukan Madrasah Aliyah Negeri Rejotangan dalam rangka meningkatkan prestasi (mutu) akademik siswa.

Menurut hemat penulis, istilah mutu berkaitan erat dengan tujuan, efektifitas dan efisiensi. Efektifitas berarti bahwa seseorang telah mencapai tujuan yang ditetapkan. Akibatnya adalah tidak mungkin suatu organisasi atau seseorang menjadi efektif dan efisien kecuali telah memperincikan tujuan sebelumnya dan telah dicapainya. Dan sinilah mutu sesuai yang diharapkan dapat tercapai secara optimal

Memang tujuan pendidikan telah dirumuskan secara jelas oleh para ahli, namun sampai sekarang belum terdapat rumusan sejauh mana tujuan tersebut telah dicapai. Itulah salah satu masalah dalam pendidikan. Sesuatu yang sangat dihargai dalam pendidikan adalah perubahan kepribadian, yakni pendidikan pada umumnya berarti daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran dan jasmani yang selaras dengan alam dan masyarakatnya, dimana hal tersebut tidak dapat diberikan kriteria secara jelas tentang keberhasilannya. Sementara itu sampai sekarang, sebagai tolok ukur keberhasilan mutu pendidikan terpaku pada nilai atau angka-angka yang tentu belum mampu mencerminkan perubahan kepribadian.

Menurut Ralph dan Fenessey, pendidikan persekolahan yang efektif harus memenuhi lima kriteria berikut.

1. Sekolah harus menghasilkan prestasi tinggi dalam ketrampilan akademik dasar, yang bukan merupakan rincian sempit kurikulum.
2. Tingkat prestasi itu harus bertahan lama, paling tidak dua tahun berturut-turut dan dengan dua kelompok siswa.
3. Tingkat prestasi itu harus diperlihatkan oleh sekolah, dalam posisi tetap tinggi untuk lebih dari satu kelas atau satu tingkatan tahun.
4. Prestasi yang diperoleh harus menjadi ciri dari sekolah secara menyeluruh, bukannya masing-masing kelas.

Semua ciri itu harus ada bahkan pada saat para peneliti memeriksa dengan cermat latar belakang siswa. Artinya prestasi tersebut perlu memperlihatkan profil sosial ekonomi populasi siswa.³⁷

Kriteria ini tampak sekali hanya berfokus kepada prestasi akademik, tetapi kriteria ini mengandung kebajikan sehingga menjadi istilah operasional serta merupakan sasaran pengukuran dan pembuktian. Oleh karena itu menjadi keha-rusan para pendidik agar menjelaskan apa yang disebut sekolah efektif atau unggul menurut kriteria mereka.

Berbeda dengan Ralph, Creemers menjelaskan bahwa sekolah dikatakan efektif jika:

1. Menggunakan waktu dalam belajar lebih maksimal,
2. Mendorong siswa untuk praktek secara mandiri,
3. Memiliki ekspektasi yang tinggi,
4. Menggunakan penguatan yang positif,
5. Sedikitnya gangguan,
6. Disiplin yang ketat,
7. Suasana yang bersahabat,
8. Eksibisi karya siswa, dan
9. Suasana fisik serta tata ruang kelas yang indah³⁸

³⁷ Poster, *Gerakan Menciptakan*, 215.

³⁸ Jamaludin, *Pembelajaran Yang Efektif*, (Jakarta: Mekarjaya, 2003), 22.

Dua pendapat tentang kriteria pendidikan sekolah yang efektif tersebut di atas menunjukkan adanya perbedaan yang sangat mendasar. Pendapat pertama menjelaskan kriteria pendidikan efektif ditinjau dari hasil pendidikannya, sedangkan pendapat kedua dilihat dari prosesnya. Meskipun demikian, dua pendapat tersebut setidaknya dapat digunakan sebagai acuan untuk mengukur efektif atau tidaknya suatu pendidikan, sehingga akan dapat diketahui tingkat “mutu atau kualitas” dan suatu proses pendidikan.

Dalam hal ini Madrasah Aliyah Negeri Rejotangan melakukan beberapa langkah pengembangan, yang meliputi:

1. Memberikan pelajaran tambahan.
2. Menyelenggarakan cerdas cermat. Hal ini dilakukan setiap tahun sekali, yang biasanya dilaksanakan pada hari-hari besar Islam.
3. Memberikan penghargaan kepada peringkat I pada setiap kelas, dengan jalan membebaskan SPP untuk satu semester.
4. Mengikutsertakan siswa berbakat dalam acara-acara perlombaan di luar sekolah, misalnya di perguruan tinggi atau lembaga pemerintah, dan sebagainya.

Mengikutkan guru-guru dalam pelatihan. Dalam hal ini Madrasah Aliyah Negeri Tulungagung 2 selalu mengikutsertakan guru-guru dalam pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Departemen Pendidikan Nasional, Kementerian Agama, maupun perguruan tinggi, baik yang bersifat seperti MGMP, maupun insidental, termasuk juga workshop dan seminar. Bahkan kepala madrasah sering mendorong guru-guru supaya melanjutkan studinya.

Kegiatan-kegiatan tersebut di atas menurut kepala madrasah dapat memotivasi terhadap siswa untuk meningkatkan prestasinya, dan melalui tambahan pelajaran akan menambah wawasan dan pendalaman siswa terhadap materi yang diajarkan. Dengan memberikan penghargaan dan perlombaan baik di dalam maupun ke luar lingkungan sekolah, siswa dapat mengukur dirinya sendiri sejauh mana materi yang telah dikuasai

dan sejauhmana orang lain telah menguasainya. Dengan demikian akan terjadi persaingan yang sehat antar siswa.

Sedangkan bagi guru, pelatihan, MGMP, dan sejenisnya, dapat dipergunakan untuk menambah wawasan, baik yang berkaitan dengan materi pelajaran ataupun teori-teori dalam kegiatan belajar mengajar, bahkan administrasi dan penelitian.

Pengembangan Keislaman

Sebagai jembatan antara model pendidikan pesantren dan model pendidikan sekolah, madrasah mempunyai kewajiban ganda. Di satu sisi, madrasah diidentikkan dengan sekolah, karena memiliki muatan kurikulum yang relatif sama dengan sekolah umum, sehingga madrasah wajib mengajarkan pelajaran yang sama dengan sekolah, termasuk juga sistem penilaian dan kriteria-kriteria yang lain. Di sisi lain, madrasah dianggap sebagai pesantren dengan sistem klasikal, sehingga madrasah berkewajiban pula untuk mengajarkan ilmu-ilmu agama, agar tidak terlalu ketinggalan dengan pesantren.

Problem yang terjadi di madrasah adalah sedikitnya proporsi jam atau materi pendidikan agama yang ada dalam muatan kurikulum. Dengan demikian, tuntutan pengembangan madrasah di bidang ke-Islaman dirasa cukup tinggi. Oleh karena itu, Madrasah Aliyah Negeri Rejotangan melakukan pengembangan ke-Islaman agar ciri khas ke-Islaman di madrasah lebih tampak nyata. Menurut Zamachsyari, bahwa ciri khas ke-Islaman ini dikembangkan melalui tiga bentuk:

Penjabaran mata pelajaran agama Islam menjadi lima mata pelajaran, yaitu Qur'an Hadits, Fiqih, Aqidah Akhlaq, Sejarah Kebudayaan Islam, dan Bahasa Arab.

Penciptaan suasana keagamaan, antara lain melalui:³⁹

1. Suasana kehidupan madrasah yang agamis,
2. Adanya sarana ibadah,

³⁹ Fatah Sukur, "Madrasah di Indonesia", dalam Ismail SM (ed.), *Dinamika Pesantren dan Madrasah*, 255.

3. Penggunaan metode pendekatan yang agamis dalam penyajian mata pelajaran yang memungkinkan
4. Kualifikasi guru, antara lain guru madrasah harus beragama Islam dan berakhlak mulia.

Adapun kegiatan yang mencerminkan nilai-nilai ke-Islaman yang dikembangkan di Madrasah Aliyah Negeri Tulungagung 2 adalah mengacu pada penciptaan suasana keagamaan dan pendalaman materi agama, yang antara lain adalah:

Menyelenggarakan shalat Dhuhur berjamaah, dan kultum dari siswa. Kegiatan ini dilakukan selama limat hari, yaitu Senin sampai Kamis dan sabtu. Tujuan dari kegiatan ini antara lain untuk melatih siswa berpidato di hadapan orang banyak. Di samping itu siswa diharapkan mampu menghayati apa yang telah disampaikan atau oleh temannya dan diamalkan dalam kehidupannya.

Mewajibkan kepada siswa untuk membaca Al-Qur'an bersama-sama setiap hari di dalam kelas selama 15 menit pada jam pertama. Dengan ini siswa akan terbiasa untuk membaca Al-Qur'an setiap hari.

Mengadakan kegiatan tahunan dan insidental, seperti pondok Romadlon, pengumpulan dan pembagian zakat fitrah, penyembelihan hewan qurban, peringatan hari-hari besar Islam, Ta'ziah, dan sebagainya.

Pengembangan Keterampilan dan Kemasyarakatan

Dalam rangka memberi bekal kepada siswa/peserta didik, Madrasah Aliyah Negeri Rejotangan memberikan beberapa kegiatan yang diharapkan mampu menambah ketrampilan dan wawasan bagi siswa setelah kembali ke masyarakat, terutama yang tidak melanjutkan sekolah. Adapun kegiatan dimaksud, antara lain:

Pelajaran Komputer (Prodistik). Pelajaran ini dilaksanakan melalui kerja sama dengan ITS Surabaya dan wajib diikuti oleh semua siswa.

Kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ini dilaksanakan pada sore hari, yaitu pada hari Kamis dan Jum'at, yang disediakan bagi siswa yang berminat. Adapun kegiatan ekstrakurikuler yang ada di Madrasah Aliyah

Negeri Rejotangan adalah Pramuka, PMR, drumband, qosidah, bela diri, seni baca Al-Qur'an, olah raga dan Paskibraka.

Kegiatan keilmuan. Kegiatan ini dilakukan dengan mengadakan kunjungan ke perguruan tinggi perusahaan tertentu, untuk survey dan pelatihan keterampilan.

Pengembangan Sumberdana dan Sarana Prasarana

Dari sekian banyak kendala yang dihadapi madrasah, persoalan dana sering kali menjadi masalah yang paling utama. Tersedia atau tidaknya biaya bagi madrasah sering kali ditunjuk sebagai sumber kegagalan utama dalam pendidikan.

Untuk mengatasi hal ini, Kementerian Agama telah melakukan beberapa langkah baik secara internal maupun eksternal, termasuk di dalamnya adalah dana dari pemerintah. Semua usaha tersebut dimaksudkan sebagai upaya peningkatan madrasah, yaitu untuk mendorong madrasah dalam melaksanakan peningkatan mutu pendidikannya.

Perlu disadari bahwa sumber APBN tidak mungkin disedot seluruhnya untuk perkembangan pendidikan, karena banyak sektor-sektor lain yang menuntut untuk dikembangkan. Namun rasanya anggaran yang disediakan untuk pendidikan dari tahun ke tahun terlihat adanya peningkatan, termasuk anggaran pendidikan yang diperoleh Kementerian Agama dan madrasah.

Lebih dari itu di sisi lain pemerintah sudah menggariskan konsep kemitraan dalam dunia pendidikan, sebuah konsep yang memberi peran besar kepada masyarakat untuk turut terlibat menangani masalah pendidikan. Hal ini tidak saja dalam bentuk inisiatif pengembangan penerapan kurikulum, tetapi juga dalam kaitannya mencari strategi pencarian dana untuk pendidikan.

Adapun Madrasah Aliyah Negeri Rejotangan dalam melaksanakan pengembangan sumber dana dan sarana-prasarana, melakukan langkah-langkah yang antara lain adalah:

1. Pengajuan bantuan ke pemerintah, melalui DIPA, BSM, BOS dan

sebagainya.

2. Bersama Komite Madrasah/Sekolah menerima sumbangan dari orang tua siswa, baik berupa iuran rutin ataupun insidental.
3. Mengadakan gerakan infaq Jum'ah yang dilakukan secara sukarela kepada seluruh warga madrasah setiap hari Jum'at.
4. Penambahan gedung laboratorium, ruang belajar dan fasilitas lainnya.
5. Penambahan koleksi buku-buku perpustakaan, baik melalui permohonan sumbangan ataupun pembelian sendiri.

Demikian seluruh langkah-langkah Madrasah Aliyah Negeri Rejotangan dalam melaksanakan upaya-upaya meningkatkan mutu pendidikan Islam. Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kelancaran proses belajar mengajar, sehingga akan mampu meningkatkan prestasi belajar siswa.

KESIMPULAN

Sebagai akhir dari pembahasan dalam penelitian ini, penulis memberikan kesimpulan yang berkenaan dengan problem-problem serta upaya-upaya madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan Islam di Madrasah Aliyah Negeri Rejotangan.

Madrasah sebagai salah satu bentuk lembaga pendidikan Islam di Indonesia baru muncul sekitar abad 20-an. Kemunculan dan perkembangan lembaga ini berkaitan erat dengan adanya pesantren. Dimana dapat dikatakan madrasah adalah lembaga pendidikan Islam yang mengajarkan ilmu-ilmu umum, atau lembaga pendidikan umum yang berciri khas Islam. Madrasah Aliyah Negeri Rejotangan merupakan salah satu bentuk lembaga pendidikan Islam di Indonesia berdiri sejak tahun 1995 yang merupakan penerusan dari Madrasah Aliyah PSM tanen.. Madrasah yang berlokasi di Desa Tanen, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung ini mengalami perkembangan yang agak lambat. Hal ini dikarenakan antara lain letaknya di pinggiran kabupaten Tulungagung.

Problem-problem yang dialami Madrasah Aliyah Negeri Rejotangan adalah tidak berbeda jauh dengan problem yang dialami oleh madrasah-madrasah lain pada umumnya. Problem-problem ini antara lain meliputi:

1. Sebagian besar input tergolong siswa yang prestasinya rendah sampai menengah.
2. Latar belakang pendidikan dan kepedulian keluarga siswa yang kurang mendukung terhadap keberhasilan proses belajar mengajar.
3. Kurangnya tenaga pengajar, baik secara kualitas maupun kuantitasnya.
4. Terlalu banyaknya materi pelajaran yang tidak dibarengi dengan banyaknya waktu (jam) yang disediakan.

Upaya-upaya Madrasah Aliyah Negeri Rejotangan dalam meningkatkan mutu pendidikan Islam dengan melakukan beberapa langkah yang meliputi:

1. Pengembangan akademik, yang dilakukan dengan jalan memberikan pelajaran tambahan, memberikan penghargaan terhadap siswa berprestasi, mengikutsertakan siswa dalam perlombaan, mengizinkan dan mengikutsertakan guru-guru dalam pendidikan dan pelatihan serta mengajukan permohonan tambahan guru dari pemerintah.
2. Pengembangan ke-Islaman, yang meliputi pengkajian kitab kuning, menyelenggarakan shalat Dhuhur berjama'ah dan kultum dari siswa, mewajibkan siswa membaca Al-Qur'an setiap hari 15 menit pada jam pertama, memberikan layanan bagi siswa yang ingin menghafal Al-qur'an serta menyelenggarakan kegiatan peringatan hari besar Islam.
3. Pengembangan bidang ketrampilan dan kemasyarakatan, yang meliputi: komputer (Prodistik), PMR, Drumband, Seni Bela Diri, diktat keorganisasian, dan ekstrakurikuler lainnya, serta pengembangan keilmuan ke perguruan tinggi.
4. Pengembangan sumber dana dan sarana-prasarana, meliputi: pengajuan bantuan kepada pemerintah, sumbangan wali murid, gerakan infaq Jum'ah, penambahan gedung laboratorium dan alat-alatnya serta penambahan koleksi buku perpustakaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abung, Ua, *Problematika Madrasah*, Jakarta: Departemen Agama RI., 2001.
- Akhyak (ed.), *Meniti Jalan Pendidikan Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003.
- Arief, Armai, *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*, Jakarta, Ciputat Press, 2002.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta, Rineka Cpta, 1999).
- Azra, Azyumardi, *Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Depdikbud., *Ensiklopedi Islam 3*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Furchan, Arief, *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*, Surabaya: Usaha Nasional, 1982.
- Hakim, Luqman, *Madrasah Tsanawiyah Terbuka*, Jakarta: Departemen Agama RI., 2004.
- Hamalik, Oemar, *Proses Belajar Mengajar*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Jalaludin, *Teologi Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Jamaluddin (ed.), *Mendiskusikan Kembali Eksistensi Madrasah*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2003.
- Maksum, *Madrasah dan Perkembangannya*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Mastuki, *Menelusuri Pertumbuhan Madrasah di Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama RI., 2001.
- Nata, Abuddin, *Manajemen Pendidikan Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Noer Aly dan Hery, Munzier, *Watak Pendidikan Islam*, Jakarta: Friska Agung Insani, 2000.
- Poster, Cyril, *Gerakan Menciptakan Sekolah Unggul*, Jakarta: Lembaga Indonesia Adidaya, 2000.
- Raharjo, M. Dawam, (ed.), *Pesantren dan Pembaharuan*, Jakarta: LP3ES, 1974.
- Rahim, Husni, *Arab Baru Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- S., Sumargono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

- Scheerens, Jaap, *Menjadikan Sekolah Efektif*, terj. Abas al-Jauhari, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2003.
- Shaleh, Abd. Rachman, *Pendidikan Agama dan Keagamaan*, Jakarta: Gemawindu Panca Perkasa, 2001.
- Sidi, Indra Djati, *Menuju Masyarakat Belajar Menggagas Paradigma Pendidikan*, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 2003.
- SM, Ismail (ed.), *Dinamika Pesantren dan Madrasah*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2002.
- Sujoto, Abd. Wafi, *Profil Madrasah Aliyah Negeri di Jawa Timur*, Surabaya, Departemen Agama Kanwil, 2003.
- Tafsir, Ahmad, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, Bandung: Remaja Karya, 2001.
- Tolkah, Imam, *Sejarah Perkembangan Madrasah*, Jakarta: Departemen Agama RI., 1999.
- Zuhairini et al, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Dirjen Bimbaga Islam, 1984.